

## POTRET SEBARAN KEPENDUDUKAN DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh : Ade P. Nasution

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang termuda di Indonesia terletak di jalur perlintasan dunia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251,810,71 km yang sebagian besar yakni 95,97 persen atau 241.251,30 km merupakan perairan. Sedangkan daratan hanya 4,21 persen terdiri dari gugusan kepulauan sebanyak 1062 pulau.

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnit Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosial yang timpang

Melihat data kependudukan pada tahun 2016 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017) dapat kita lihat bahwa penduduk Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 2,028,169 jiwa. Kota Batam merupakan tempat penduduk terbesar yaitu 1.236.399 Jiwa (61,0 %), Kabupaten Karimun 227.277 jiwa (11,2 %), Kab. Bintan 154.584 (7,6 %), Kota Tanjung Pinang 204.735 jiwa (10,1 %), Kab. Natuna 75,282 jiwa (3,7 %) dan Kab. Lingga 88.971 Jiwa (4,4 %).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kepulauan Riau</b>	1.692.816	1.748.810	1.805.089	1.861.373	1.917.415	1.973.043	2.028.169
Karimun	213.479	216.146	218.475	220.882	223.117	225.298	227.277
Bintan	143.020	145.057	147.212	149.120	151.123	153.020	154.584
Natuna	69.416	70.423	71.454	72.527	73.470	74.520	75.282
Lingga	86.513	87.026	87.482	87.867	88.274	88.591	88.971
Kepulauan Anambas	37.629	38.210	38.833	39.374	39.892	40.414	40.921
Batam	954.450	1.000.661	1.047.534	1.094.623	1.141.816	1.188.985	1.236.399
Tanjungpinang	188.309	191.287	194.099	196.980	199.723	202.215	204.735

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

Struktur Perekonomian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Propinsi Kepri yaitu sebesar 53,53 % yang menyumbang Rp. 2.014.048.080.000 dari total PDRB sebesar Rp. 3.762.584.520.000 sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 6 % dalam PDRB dan sektor pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Dan kita sama sama tahu bahwa potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan pertambangan

Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kabupaten Bintan 48,1% sedangkan di Kota Batam hanya 24,1 % saja. Hal ini konsisten dengan kontribusi sektor Industri pengolahan diatas, dimana pada sektor industri pengolahan pekerjanya bersifat formal.sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian.

Dari data kuantitatif diatas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata dan juga dalam infrastruktur.

Kota Batam, dalam upaya pengendalian kependudukan mempunyai perangkat hukum yaitu Perda No.2 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian kependudukan. Perda ini dimaksudkan untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk kota Batam. Namun keefektivitasan perda ini masih perlu dipertanyakan mengingat dari tahun ketahun jumlah pencari kerja di Kota Batam semakin meningkat secara signifikan demikian juga dengan daya tampung Sekolah yang dari tahun ketahun semakin tidak mampu menampung anak usia sekolah.

Kebijakan pengendalian penduduk melalui instrumen pengaturan dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor alamiah kenapa terjadi urbanisasi itu dijawab dahulu. Menurut Michael P. Todaro (2002) , ada beberapa faktor alamiah dan rasional mengapa orang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih maju adalah disebabkan :

1. Urbanisasi Desa-Kota, dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional yang berhubungan dengan keuntungan dan biaya-biaya relative
2. Keputusan urbanisasi juga ditentukan tergantung pada tingkat selisih pendapatan yang diharapkan antara pendapatan di kota besar dan pendapatan di desa asal. Besar kecilnya selisih pendapatan itu ditentukan oleh 2 variabel pokok yaitu selisih besaran aktual di kota dan desa serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan yang sesuai dengan yang diharapkan
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Propinsi Kepulauan Riau pada periode Maret 2010-Maret 2011 menurun sebesar 100 orang, yaitu dari 129.660 orang pada tahun 2010 menjadi 129.560 orang pada tahun 2011. Persentase penduduk miskin menurun dari 8,05 persen menjadi 7,40 persen pada periode yang sama.

Jumlah penduduk miskin daerah pedesaan menurun 39.380 orang, dari 62.590 orang pada tahun 2010 menjadi 23.210 pada tahun 2011. Namun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 39.270 orang, yaitu dari 67.080 orang pada tahun 2010 menjadi 106.350 orang pada tahun 2011.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Maret 2010 – Maret 2011 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut cukup stabil, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 6,39 persen. Namun peningkatan di daerah perkotaan dikarenakan kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, angkutan dan bensin cukup tinggi. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin

### **Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau s.d. Agustus 2011**

Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2011 mencapai 847.997 orang, meningkat sebanyak 21.462 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2010, yaitu sebesar 826.535 orang; atau bertambah sebanyak 11.388 orang jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2011, yaitu sebesar 836.609 orang.

Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Agustus 2011 sebesar 781.824 orang, meningkat sebanyak 12.338 orang jika dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2010; atau meningkat sebanyak 4.098 orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011.

Pada bulan Agustus 2010, struktur penduduk yang bekerja di sektor industri kembali naik dari 19,2 persen pada bulan Februari 2011 menjadi 25,0 persen.

Tidak terserapnya sejumlah angkatan kerja dalam lapangan kerja pada beberapa sektor menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,90 persen (Agustus 2010) atau 7,04 persen (Februari 2011) menjadi 7,80 persen. Dengan kata lain, TPT Kepri naik 0,90 persen dalam kurun waktu 1 tahun, atau turun sebesar 0,76 persen selama kurun waktu 6 bulan terakhir.

Pada Agustus 2011, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Kepri menurut status pekerjaan utamanya, yaitu dengan jumlah sebanyak 527.770 orang, atau sebesar 67,5 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.

Untuk tingkat kabupaten/kota, tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Batam (8,57 persen) dan terendah terdapat di Kabupaten Lingga (3,55 persen). Adapun kabupaten/kota yang TPT-nya meningkat yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengadakan penataan persebaran penduduk di Propinsi kepulauan Riau, dapat diambil kesimpulan yang merekomendasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk menata persebaran penduduk yang diharapkan akan menghapus berbagai kesenjangan-kesenjangan yang selama ini terjadi, baik kesenjangan penduduk, struktural, regional dan kesenjangan lainnya yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan kabupaten/kota se Propinsi Kepulauan Riau, karena penataan sebaran kependudukan, setiap daerah harus mempunyai kesamaan visi, misi dan tujuan. Untuk itu, berbagai kebijakan-kebijakan dapat diambil diantaranya :

- Upah tenaga Kerja  
Perbedaan Upah tenaga kerja di setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan terjadinya arus urbanisasi/migrasi ke daerah yang upah tenaga kerjanya lebih tinggi. Kebijakan Upah tenaga kerja adalah keputusan penetapan UMK, UMS maupun UMP yang sama ataupun mempunyai selisih yang tidak terlalu besar di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
- Perlakuan yang sama terhadap fasilitas khusus fiskal dan moneter  
Batam, Bintan dan Karimun yang telah menikmati fasilitas Bonded Zone Plus (BZP) mendapatkan kemudahan fiskal dalam interaksi ekonominya. Diharapkan fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga
- Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain  
Kebijakan ini adalah memindahkan lokasi pabrik/plant ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.
- Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah  
menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Pulau bintan konsentrasi dengan Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata

- Meningkatkan pembangunan infrastuktur didaerah kab/kota yang sebaran penduduknya minim seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi.
- Akibat bertumpuknya infrastruktur di batam, maka berakibat segala kegiatan ekonomi baik yang domestik maupun internasional semuanya bertumpu di Kota Batam
- Pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan, Ketersediaan Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.
- Dari segi aparaturn pemerintahan, perlu menyiapkan segera SIAK Online (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang mencatat secara akurat data mutasi penduduk yang berhubungan (link) dengan instansi pendukung fasilitas seperti PLN, ATB, Bandara, Pelabuhan, kepolisian, BPS dan Instansi lainnya